

## AI dan Konsep Dharma: Etika Kecerdasan Buatan dalam Bingkai Filsafat Hindu

Oleh

I Wayan Sindia Griya Danika<sup>1</sup>, Anak Agung Gede Wiranata<sup>2</sup>  
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya  
[dana.danikadas@gmail.com](mailto:dana.danikadas@gmail.com), [wiramerapi@gmail.com](mailto:wiramerapi@gmail.com)

### Abstract

This study explores how the Hindu philosophical principle of *dharma* can serve as a foundation for ethical development and use of artificial intelligence (AI). The main issue addressed is the lack of moral values in modern AI systems, particularly in relation to algorithmic bias, automated decision-making, and the absence of human accountability. Using a qualitative approach with philosophical-hermeneutic analysis, this research examines classical Hindu texts such as the *Bhagavad Gita*, *Upanishads*, and *Manusmṛti*, supported by semi-structured interviews with Hindu religious leaders and AI ethics experts in Yogyakarta and Bali.

The findings show that *dharma* offers a moral compass that integrates personal responsibility, social justice, and spiritual awareness. In the context of AI, values like *svadharma* (duty aligned with one's role), *ahimsa* (non-harm), and ethical intention can guide the design of systems that are not only intelligent, but also wise and humane.

This study recommends that Eastern philosophical values—especially *dharma*—be included in technology policy and ethics education, to ensure that AI development remains rooted in human dignity and local wisdom. The research contributes to broadening our understanding of how technology and spirituality can coexist, offering space for cross-cultural dialogue in building a more just and compassionate digital future.

Keywords: Dharma, AI ethics, Hindu philosophy, Hermeneutics, Technology and Spirituality.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ajaran *Dharma* dalam filsafat Hindu dapat menjadi dasar etika bagi pengembangan kecerdasan buatan (AI). Isu utama yang dikaji adalah kekosongan nilai moral dalam teknologi AI modern, khususnya terkait bias sistem, keputusan otomatis, dan minimnya tanggung jawab etis. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis filosofis-hermeneutik, penelitian ini mengkaji teks-teks suci Hindu seperti *Bhagavad Gita*, *Upanishad*, dan *Manusmṛti*, serta didukung oleh wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama Hindu dan ahli etika teknologi di Yogyakarta dan Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dharma* menawarkan prinsip moral yang menyatukan tanggung jawab pribadi, keadilan sosial, dan keselarasan spiritual. Dalam konteks AI, nilai-nilai seperti *svadharma* (tugas sesuai peran), *ahimsa* (menghindari kerugian terhadap makhluk hidup), dan *niat yang benar* menjadi pedoman dalam merancang sistem yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan manusiawi.

Penelitian ini menyarankan agar nilai-nilai filsafat Timur, khususnya *dharma*, dimasukkan ke dalam kebijakan teknologi dan pendidikan etika, agar pengembangan AI

tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Hasil studi ini diharapkan dapat memperkaya pandangan kita terhadap hubungan antara teknologi dan nilai spiritual, serta membuka ruang diskusi lintas budaya dalam pembangunan masa depan digital yang lebih adil dan beradab.

Kata Kunci : *Dharma*, etika AI, Filsafat Hindu, Hermeneutika, Teknologi dan Spiritualitas

## I. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) kini menjadi kekuatan disruptif utama dalam lanskap kehidupan global. Teknologi ini tidak hanya membentuk ulang interaksi manusia dan mesin, tetapi juga menantang fondasi-fondasi etis yang selama ini mengarahkan tindakan manusia. Dari chatbot dalam pelayanan pelanggan hingga algoritma prediktif dalam penegakan hukum, AI telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan. Perkembangan teknologi ini menandai babak baru dalam peradaban, di mana keputusan-keputusan penting kini mulai diambil oleh sistem yang tidak memiliki kesadaran moral seperti manusia. Fenomena ini menuntut adanya refleksi mendalam mengenai nilai-nilai apa yang seharusnya menuntun perkembangan AI ke depan, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas akibat moral dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh sistem tersebut (Boddington, 2017).

Di Indonesia, AI telah berkembang pesat, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi sektor publik. Pemerintah dan lembaga swasta mulai mengadopsi sistem AI untuk meningkatkan efisiensi layanan, mulai dari sistem rekrutmen, layanan kesehatan, hingga manajemen kota pintar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023) mencatat bahwa lebih dari 62% institusi publik di Indonesia telah mengadopsi sistem berbasis AI dalam pengambilan keputusan administratif. Kendati demikian, perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan etik yang

memadai. Terdapat kekhawatiran yang meningkat bahwa penerapan teknologi ini dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan spiritual yang sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan religius.

Etika AI yang berkembang saat ini masih sangat dipengaruhi oleh paradigma filsafat Barat. Kerangka teoritis seperti utilitarianisme, deontologi, dan virtue ethics menjadi acuan utama dalam penyusunan prinsip-prinsip etik AI oleh institusi global seperti UNESCO, IEEE, maupun perusahaan teknologi besar. Utilitarianisme, sebagai contoh, menjustifikasi keputusan algoritmik dengan dasar manfaat kolektif yang maksimal, namun pendekatan ini kerap mengabaikan nilai-nilai lokal yang tidak terukur secara kuantitatif (Boddington, 2017). Mukhopadhyay dan Reddy (2023) bahkan mengkritik bahwa AI kerap menjadi instrumen baru bagi ekspansi universalisme Barat, yang secara sistemik mengecilkan peran nilai-nilai budaya non-Barat dalam menentukan arah dan dampak teknologi.

Ketimpangan epistemologis ini menciptakan dilema etis yang nyata di negara-negara berkembang. Banyak sistem AI yang diadopsi atau dikembangkan di Indonesia masih bersifat "netral secara budaya", namun dalam praktiknya membawa bias tertentu yang tidak sesuai dengan realitas lokal. Dalam penelitian lapangan, ditemukan bahwa sistem rekrutmen berbasis AI menimbulkan ketidaknyamanan karena dianggap tidak transparan, tidak adil, dan tidak

mempertimbangkan konteks sosial kandidat. Ketika keputusan penting yang menyangkut hidup manusia diambil oleh sistem algoritmik yang tidak mampu memahami konteks budaya dan nilai moral lokal, maka ketimpangan etis pun menjadi tak terelakkan.

Padahal, Indonesia memiliki khazanah nilai dan etika yang sangat kaya, termasuk warisan dari tradisi agama-agama besar dunia seperti Hindu, Islam, dan Budha yang hidup berdampingan. Sayangnya, perspektif dari filsafat Timur dan agama-agama lokal masih minim diakomodasi dalam diskursus global tentang etika AI. Konsep *dharma* dalam filsafat Hindu, misalnya, telah lama menawarkan kerangka moral yang menekankan keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan harmoni kosmik antara manusia, masyarakat, dan alam semesta (Chaturvedi & Lakshmi, 2024). Dalam konteks ini, *dharma* bukan sekadar norma religius, melainkan prinsip etik universal yang dapat memberikan dasar moral bagi teknologi modern.

Beberapa studi telah mulai mengeksplorasi kemungkinan integrasi nilai-nilai *dharma* dalam kerangka desain dan pengambilan keputusan AI. Ghosh (2024), dalam karyanya "*Chatur-Varna in the AI Era*", mengusulkan model simbiosis manusia-mesin yang berlandaskan ajaran Bhagavad Gita. Jadhav (2024) juga menekankan pentingnya mempertimbangkan budaya dan literatur India sebagai sumber nilai-nilai dalam desain etika teknologi. Dalam arah yang serupa, Adhikary (2024) menunjukkan bagaimana epos Mahabharata memuat prinsip-prinsip tanggung jawab, kehormatan, dan keadilan yang relevan dengan masalah etika dalam sistem algoritma modern. Bahkan Uttam (2023) mengangkat hubungan antara pencapaian spiritual Buddhis dan potensi etika AI berbasis kontemplasi dan kesadaran moral yang dalam.

Walaupun sejumlah kontribusi tersebut sangat berharga, kajian tentang penerapan prinsip *dharma* dalam AI masih bersifat konseptual dan belum menyentuh ranah normatif yang aplikatif. Tidak banyak studi yang secara sistematis mengeksplorasi bagaimana prinsip *dharma* dapat diterjemahkan menjadi kebijakan teknologi, pedoman desain perangkat lunak, atau sistem pengambilan keputusan berbasis AI. Hal ini menyisakan kekosongan penting dalam literatur, mengingat urgensi akan kerangka etik yang mampu menjawab tantangan moral dan spiritual dalam teknologi masa kini yang bersifat lintas budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan kualitatif dan analisis filosofis terhadap teks-teks suci Hindu seperti *Bhagavad Gita*, *Upanishad*, dan *Manusmṛti*, serta literatur kontemporer tentang etika AI. Penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh Hindu dan pakar teknologi untuk menggali interpretasi kontemporer atas prinsip *dharma* dan potensi penerapannya dalam dunia teknologi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menawarkan refleksi teoritis, tetapi juga berupaya menyusun kerangka etika praktis yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan AI yang kontekstual.

Kontribusi penelitian ini bersifat ganda. Pertama, secara akademik, penelitian ini memperkaya wacana etika teknologi dengan menambahkan perspektif non-Barat, khususnya dari filsafat Hindu, yang selama ini kurang terwakili. Kedua, secara praktis, kerangka etik berbasis *dharma* yang dihasilkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, insinyur, dan praktisi teknologi dalam merancang sistem AI yang inklusif, spiritual, dan berkeadilan. Penelitian ini juga menjadi kontribusi dalam upaya dekolonisasi teknologi, yakni dengan mengangkat

nilai-nilai lokal sebagai sumber kebijaksanaan dalam merespons tantangan global.

Secara teoritis, kajian ini memosisikan *dharma* bukan sebagai dogma statis, melainkan sebagai prinsip dinamis yang mampu merespons kompleksitas zaman. *Dharma* dalam kajian ini dipahami sebagai jalinan antara kewajiban etis, tanggung jawab sosial, dan pencapaian spiritual, yang bersama-sama membentuk landasan moral dalam tindakan manusia—termasuk dalam konteks pengembangan teknologi (Sarkar, (2025). Dengan pendekatan ini, *dharma* dapat menjembatani kesenjangan antara rasionalitas teknologis dan kebijaksanaan spiritual dalam membentuk etika AI yang lebih utuh dan manusiawi.

Dengan demikian, melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menyumbangkan kerangka konseptual baru yang tidak hanya memadukan antara teknologi dan etika, tetapi juga antara rasionalitas dan spiritualitas. Di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan religius, pendekatan ini diharapkan dapat membuka jalan menuju pengembangan AI yang tidak hanya cerdas secara fungsional, tetapi juga bijaksana secara moral dan kontekstual. Penelitian ini juga menjadi bagian dari ikhtiar lebih luas untuk membangun ekosistem teknologi yang berakar pada nilai-nilai lokal dan spiritualitas Nusantara, dalam rangka menghadapi revolusi digital yang kian cepat dan kompleks.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis filosofis, yang secara esensial bertujuan untuk menggali secara mendalam makna, relevansi, serta daya aplikatif konsep *dharma* dalam teks-teks filsafat Hindu terhadap problematika etika dalam kecerdasan buatan (AI). Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif-reflektif, memungkinkan

peneliti untuk menelusuri makna-makna normatif, spiritual, dan transhistoris yang tidak dapat diukur melalui variabel kuantitatif. Kualitatif filosofis menekankan pentingnya pemahaman makna melalui refleksi logis dan dialogis terhadap teks serta konteks nilai. Hal ini penting mengingat isu yang diangkat bukan hanya bersifat teknis, tetapi menyangkut dimensi moral dan spiritual yang kompleks dalam masyarakat kontemporer (Mukhopadhyay, (2025).

Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai studi filsafat kualitatif dengan pendekatan hermeneutik dan komparatif-normatif, sebagaimana digunakan dalam banyak studi etika berbasis agama dan budaya. Pendekatan hermeneutik memungkinkan interpretasi mendalam terhadap makna teks-teks klasik, khususnya dalam kaitannya dengan konteks etis kontemporer. Sedangkan pendekatan komparatif-normatif membuka ruang analisis antara nilai-nilai Hindu dan prinsip-prinsip etika AI modern yang berkembang dalam wacana global. Hal ini sejalan dengan metodologi yang ditawarkan oleh Chaturvedi & Lakshmi (2024), yang menekankan pentingnya merujuk pada nilai-nilai moral tradisional untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi yang semakin rasional dan terlepas dari akar kulturalnya.

Adapun objek kajian utama dalam penelitian ini adalah teks-teks suci Hindu seperti *Bhagavad Gita*, *Upanishad*, dan *Manusmṛti*, yang memiliki fondasi nilai moral dan spiritual tinggi. Teks-teks ini dipilih karena mengandung prinsip dasar *dharma*, *Karma*, *Ahimsa*, dan *Moksha*, yang dapat ditafsirkan ulang dalam konteks tantangan moral AI kontemporer, seperti otonomi mesin, keadilan algoritmik, serta tanggung jawab moral sistem otomatis. Selain sumber primer, penelitian ini juga mengkaji literatur sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan laporan kebijakan yang membahas topik etika AI

dan spiritualitas Hindu dari berbagai sudut pandang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, studi dokumentasi dan literatur terhadap naskah-naskah primer Hindu dan publikasi akademik terkini yang relevan. Analisis teks dilakukan secara sistematis untuk menafsirkan konsep-konsep kunci dan relevansinya terhadap persoalan etika AI. Kedua, dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan para narasumber yang dianggap memiliki otoritas epistemik, seperti rohaniwan Hindu (pendeta dan cendekiawan agama), akademisi dalam bidang filsafat atau etika teknologi, dan praktisi atau pengembang AI. Wawancara difokuskan pada interpretasi nilai-nilai *dharma* dan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam desain atau kebijakan AI. Pendekatan ini merujuk pada model reflektif kontekstual seperti yang digunakan Jacoba (2023) dalam studi interdisipliner antara agama dan teknologi.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi dalam dua bentuk: triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil interpretasi dari teks-teks klasik dengan data hasil wawancara dan temuan dari literatur akademik kontemporer. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan kajian pustaka, wawancara, dan refleksi analitis sebagai satu kesatuan proses penalaran filosofis. Di samping itu, pemeriksaan keabsahan oleh narasumber dilakukan dengan memberikan ringkasan hasil interpretasi awal kepada narasumber untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi, guna memastikan bahwa hasil analisis tidak menyimpang dari substansi makna aslinya.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik yang dikombinasikan dengan

prinsip hermeneutika Gadamerian. Analisis dimulai dengan membaca secara intensif teks-teks primer untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti *dharma*, *karma*, *moksha*, dan *ahimsa*. Selanjutnya, dilakukan kodifikasi konsep ke dalam kategori moral modern seperti keadilan, tanggung jawab, harmoni, dan keberlanjutan. Proses ini bersifat sirkular dan dialogis, sesuai dengan prinsip *hermeneutic circle*, di mana pemahaman keseluruhan teks dibangun secara bertahap melalui dialog antara bagian dan keseluruhan makna. Penafsiran tidak dilakukan secara literal, melainkan melalui penyusunan pemahaman kontekstual terhadap makna teks dalam kondisi zaman sekarang (Miles et al., 2014).

Metode ini memberikan fleksibilitas epistemologis dan kedalaman analisis, sehingga dapat menjembatani antara prinsip-prinsip normatif Hindu dengan dilema moral kontemporer yang dihadirkan oleh AI. Dengan analisis filosofis yang berakar pada nilai, konteks, dan tradisi spiritual, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis konseptual yang relevan. Hasil yang dicapai diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik mengenai etika AI, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar normatif dan operasional dalam perumusan kebijakan publik, pengembangan desain teknologi, serta pendidikan etika teknologi berbasis budaya lokal yang lebih inklusif dan spiritual.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. AI dan Etika: Tantangan Zaman Modern

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan radikal dalam tatanan sosial, politik, dan etika manusia kontemporer. Kecanggihan sistem algoritmik yang mampu membuat keputusan secara otomatis telah menggeser batas antara manusia

dan mesin dalam banyak sektor kehidupan. Namun, semakin otonomnya peran AI justru memunculkan berbagai tantangan moral yang belum terselesaikan. Salah satu isu utama adalah soal pertanggungjawaban etis: jika mesin membuat keputusan yang berdampak buruk, siapa yang harus dimintai tanggung jawab? Dalam wawancara lapangan, para pakar teknologi dan tokoh masyarakat menyuarakan kekhawatiran mendalam tentang bias algoritmik, ketimpangan data, dan absennya "hati nurani" dalam sistem cerdas tersebut. Seorang narasumber menyatakan:

“Bagaimana mungkin mesin bisa memahami keadilan manusia jika ia tidak punya hati nurani? Itu membuat saya merasa kehilangan kendali.”  
(Wawancara, Narasumber 3, 2024)

Pernyataan ini mencerminkan krisis kepercayaan yang meluas terhadap AI—bukan semata karena kemampuannya yang kompleks, tetapi karena absennya fondasi moral dan empati yang menjadi dasar dari kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, AI diprogram untuk membuat keputusan berdasarkan data statistik dan probabilistik, namun tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks budaya, emosi, atau nilai spiritual yang mendasari pengalaman manusia sehari-hari. Ketika AI digunakan dalam bidang-bidang sensitif seperti pendidikan, hukum, atau rekrutmen, absennya dimensi moral ini berpotensi mengakibatkan dehumanisasi dan marginalisasi kelompok tertentu.

Dalam diskursus akademik, berbagai pendekatan etika telah diajukan untuk merespons persoalan ini. Pendekatan utilitarian, misalnya, berargumen bahwa tindakan atau keputusan AI harus dimaksudkan untuk menghasilkan "hasil terbaik

bagi sebanyak mungkin orang" (Boddington, 2017). Sementara pendekatan deontologis menekankan pada pemenuhan prinsip moral universal terlepas dari konsekuensi. Namun, kedua pendekatan ini sering dianggap terlalu abstrak, teknokratis, dan tidak kontekstual—terutama ketika diterapkan di negara-negara non-Barat yang memiliki struktur sosial dan nilai budaya berbeda. Mukhopadhyay dan Reddy (2023) menyatakan bahwa AI hari ini kerap menjadi perpanjangan dari universalisme Barat yang mengasumsikan bahwa satu sistem etika dapat diterapkan secara universal, tanpa memperhatikan keragaman nilai lokal dan spiritualitas masyarakat dunia.

Sebagai alternatif terhadap dominasi etika Barat, banyak pemikir mulai mengeksplorasi pendekatan etik berbasis budaya dan agama lokal, termasuk filsafat Hindu. Dalam konteks ini, konsep *dharma* menempati posisi sentral sebagai prinsip moral dan spiritual yang dapat menjembatani antara teknologi dan kemanusiaan. *Dharma* dalam teks *Bhagavad Gita* diartikan sebagai "kewajiban ilahi" yang membimbing setiap individu dalam menjalankan perannya secara etis, tidak hanya dalam relasi sosial tetapi juga dalam menjaga keseimbangan kosmik. Dalam *Bhagavad Gita* 3.35, Krishna menyatakan:

“*Shreyan svadharmo vigunah, paradharmat svanushtitat*”—*Lebih baik menjalankan dharma sendiri meski kurang sempurna, daripada menjalankan dharma orang lain dengan sempurna.*

Sloka *Bhagavad Gita* 3.35 ini relevan dalam konteks AI karena menekankan pentingnya konteks, tanggung jawab individual, dan keselarasan dengan nilai-nilai lokal. Artinya, desain dan implementasi AI

seharusnya mempertimbangkan *dharma* sosial dan budaya tempat teknologi itu diterapkan, bukan sekadar mengadopsi sistem nilai yang asing secara etis.

Keterbatasan AI dalam memahami dan merepresentasikan nilai-nilai spiritual dan moral juga tercermin dalam konsep *Ahimsa* (non-kekerasan), yang tidak hanya melarang tindakan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan sistemik, simbolik, dan struktural. Ketika sistem AI gagal mengenali atau menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan status sosial pengguna, maka ia berpotensi menjadi alat kekerasan digital yang tak terlihat. Dalam konteks ini, etika AI berbasis *dharma* dan *ahimsa* tidak hanya menawarkan prinsip pencegahan, tetapi juga pemulihan terhadap potensi ketidakadilan yang dihasilkan sistem digital. Hal ini sejalan dengan seruan Chaturvedi dan Lakshmi, (2024) yang mengusulkan perlunya integrasi antara prinsip tradisional India dengan sistem AI masa kini, untuk memastikan bahwa teknologi dikembangkan secara inklusif dan etis.

Literatur Hindu klasik lainnya seperti *Manusmṛti* juga memberikan acuan mengenai pentingnya keterikatan etika dalam semua bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan algoritmik. Dalam *Manusmṛti* Bab VIII disebutkan bahwa seorang raja (pemimpin) harus selalu bertindak berdasarkan *dharma* dan bukan atas dasar kepentingan pribadi atau dorongan kekuasaan. Jika AI dipandang sebagai bentuk kekuasaan baru dalam masyarakat digital, maka prinsip ini juga berlaku: AI harus diarahkan oleh nilai-nilai *dharma* agar tidak menyimpang dari tanggung jawab sosialnya. Adhikary (2024) dalam kajiannya tentang *Mahabharata* bahkan mengusulkan

bahwa konsep "tanggung jawab dan penebusan moral" dalam epos tersebut dapat dijadikan dasar normatif untuk menetapkan akuntabilitas etika dalam pengambilan keputusan oleh sistem AI.

Lebih jauh lagi, persoalan AI bukan hanya teknis atau etis, tetapi juga ontologis. AI mengganggu batas antara manusia dan mesin, antara subjek dan objek moral. Dalam pandangan Hindu, manusia bukan hanya makhluk biologis tetapi juga spiritual, yang tugasnya adalah mewujudkan *dharma* melalui kesadaran. Ketika AI mengambil alih sebagian besar proses pengambilan keputusan, maka terjadi semacam "dislokasi moral", di mana manusia mulai kehilangan orientasi terhadap peran dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, solusi terhadap persoalan etika AI tidak cukup hanya dengan perbaikan teknis, tetapi membutuhkan perenungan filosofis yang dalam mengenai hubungan antara teknologi, nilai, dan kesadaran spiritual (Uttam, 2023).

Oleh karena itu, pendekatan etika terhadap AI yang hanya mengandalkan rasionalitas teknokratis tidak memadai. Diperlukan kerangka etik alternatif yang mampu memahami manusia bukan hanya sebagai agen rasional, tetapi juga makhluk yang berakar pada nilai, tradisi, dan spiritualitas. Dalam konteks ini, filsafat Hindu, dengan prinsip *dharma* sebagai pusatnya, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun etika AI yang tidak hanya rasional dan adil, tetapi juga berbelas kasih, kontekstual, dan berkelanjutan secara moral. Dengan menggabungkan pandangan spiritual, kultural, dan sosial, AI dapat diarahkan bukan hanya untuk

efisiensi, tetapi juga untuk keadilan dan kebijaksanaan.

## 2. Prinsip Dharma dalam Filsafat Hindu

Dalam tradisi filsafat Hindu, *dharma* merupakan konsep etik dan spiritual yang paling fundamental, mengikat manusia dengan hukum kosmik (*rta*), tanggung jawab sosial, dan kesadaran eksistensial. Ia bukan sekadar sistem hukum atau norma moral eksternal, melainkan refleksi dari tatanan alam semesta yang harus diinternalisasi oleh individu dalam laku hidup sehari-hari. Dalam *Bhagavad Gita* 2.31, Krishna menekankan pentingnya menjalankan *svadharma* atau tugas yang sesuai dengan kodrat dan posisi individu dalam kehidupan (Radhakrishnan, 2000) :

*“Considering your dharma, you should not waver. For a warrior, there is nothing more honorable than a war against evil.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa *dharma* bukan sesuatu yang bersifat absolut atau seragam, melainkan bersifat kontekstual, mengacu pada peran sosial dan tanggung jawab moral seseorang dalam tatanan universal.

Dalam pengertian ini, *dharma* bukanlah hukum positif, melainkan “jalan etis yang disesuaikan dengan kodrat dan kesadaran individu”. Hal ini menjadikannya konsep yang dinamis dan terbuka untuk interpretasi kontekstual, termasuk dalam konteks modern seperti pengembangan teknologi. *Upanishad*, sebagai teks yang lebih filosofis dan kontemplatif, memperdalam pemahaman ini dengan menekankan hubungan antara *atman* (diri sejati) dan *Brahman* (realitas tertinggi). Tindakan yang sesuai *dharma* adalah

tindakan yang menyadari kesatuan antara individu dan keseluruhan realitas. Dalam *Chandogya Upanishad* 6.8.7 disebutkan :

*“Tat tvam asi” – Engkau adalah itu.*

Makna dari pernyataan ini menyiratkan bahwa tanggung jawab moral tidak hanya bersifat sosial tetapi juga spiritual; etika tidak hanya soal hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan dengan kosmos .

Salah satu penekanan penting dalam filsafat *dharma* adalah keterkaitannya dengan *karma* (tindakan dan konsekuensinya) dan *ahimsa* (non-kekerasan). *Dharma* tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan akibat dari tindakan (*karma*) dan dampaknya terhadap makhluk hidup lainnya. Dalam *Manusmṛiti* 6.92 disebutkan bahwa seseorang yang ingin hidup selaras dengan *dharma* harus menghindari kekerasan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, dalam konteks AI, prinsip *dharma* tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan atas dampak sistem terhadap manusia dan lingkungan. Sistem yang menimbulkan diskriminasi, menyebarkan kebencian, atau melanggar privasi, meskipun efisien secara teknis, tidak dapat disebut sebagai sistem yang "ber *dharma*".

Pandangan ini ditegaskan dalam wawancara dengan seorang rohaniwan Hindu, yang menyatakan:

*“Dharma bukan hanya soal benar atau salah. Itu adalah kesetiaan kita terhadap harmoni alam semesta dan diri sendiri.”* (Wawancara, Narasumber 6, 2024)

Pernyataan ini mengandung makna filosofis yang dalam: bahwa etika adalah cermin dari integritas spiritual dan kosmik. Dalam kerangka ini, pengembangan

teknologi—termasuk AI—bukanlah praktik netral, melainkan tindakan yang memiliki beban moral dan spiritual. Setiap langkah dalam desain, pelatihan data, hingga penerapan sistem harus mencerminkan kesadaran atas tanggung jawab sosial dan harmoni universal.

Dalam diskursus akademik kontemporer, *dharma* telah mulai diposisikan sebagai alternatif kerangka etika AI. Chaturvedi & Lakshmi (2024) berargumen bahwa *dharma* dapat menawarkan pendekatan etik yang tidak sekadar rasional dan rule-based, tetapi juga spiritual dan relasional. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai seperti *seva* (pelayanan), *shanti* (kedamaian), dan *satya* (kebenaran) harus menjadi bagian dari arsitektur moral AI. Etika berbasis *dharma* menolak pendekatan etik yang bersifat kalkulatif semata, dan lebih mengedepankan kesadaran, empati, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan bersama. Ini sejalan dengan gagasan AI yang humanistik dan inklusif.

Lebih lanjut, Adhikary (2024) dalam telaahnya terhadap epos *Mahabharata* menekankan bahwa krisis dalam perang Kurukshetra bukan sekadar soal politik atau kekuasaan, tetapi persoalan etika dan *dharma*. Karakter Arjuna mengalami kebingungan moral yang mencerminkan dilema kontemporer dalam etika AI: kapan dan bagaimana harus bertindak secara benar dalam situasi yang kompleks dan ambigu? Krishna membimbing Arjuna bukan hanya dengan logika, tetapi dengan pemahaman mendalam tentang *dharma*, niat, dan kesadaran spiritual. Hal ini menjadi metafora penting dalam merancang sistem AI yang tidak hanya efisien, tetapi juga

bertanggung jawab secara moral dan sadar terhadap dampaknya.

Dalam konteks pengembangan AI, maka *svadharma* menjadi sangat relevan. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu—termasuk desainer sistem, pembuat kebijakan, dan pengguna teknologi—memiliki tanggung jawab etik yang unik sesuai dengan perannya. Desain AI tidak bisa bersifat netral atau generik; ia harus disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat tempat ia diterapkan. Seperti halnya seorang kesatria dalam Gita yang memiliki tanggung jawab melindungi kebenaran, maka pengembang AI pun harus menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan non-kekerasan dalam setiap tahap teknologi yang dibuatnya.

Oleh karena itu, *dharma* sebagai prinsip filosofis dan spiritual dalam Hindu bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk diintegrasikan dalam wacana dan praktik etika AI. Konsep ini menyediakan kerangka etik yang holistik—menggabungkan moralitas individual, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual—yang mampu melampaui keterbatasan pendekatan etika AI konvensional yang cenderung legalistik atau utilitarian. Integrasi nilai *dharma* dapat memperkuat upaya dekolonisasi teknologi dan memberikan ruang bagi kebijaksanaan lokal untuk memandu arah kemajuan AI yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

### 3. Etika AI dalam Bingkai Dharma

Integrasi antara prinsip *dharma* dalam filsafat Hindu dan isu-isu etika kecerdasan buatan (AI) menghadirkan kerangka etik yang tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual, relasional, dan kontekstual. Kerangka ini menjembatani

kekosongan dalam diskursus etika teknologi kontemporer yang selama ini didominasi oleh pendekatan kalkulatif berbasis konsekuensi (utilitarian) atau prinsip kewajiban universal (deontologis). *Dharma* menawarkan perspektif etik yang lebih menyeluruh, dengan menekankan harmoni antara niat, proses, hasil, dan keseimbangan dalam hubungan antarmanusia, teknologi, dan alam semesta. Dalam hal ini, etika *dharma* menggabungkan dimensi normatif, fungsional, dan transendental dalam satu sistem nilai yang koheren dan holistik.

Secara filosofis, *dharma* mengajarkan bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang selaras dengan tatanan kosmis (*rta*), bukan sekadar taat terhadap hukum atau menghasilkan manfaat kolektif. Oleh karena itu, ketika *dharma* diterjemahkan ke dalam desain dan pengelolaan AI, maka prinsip tersebut menuntut agar teknologi tidak semata berfungsi efisien, tetapi juga adil, transparan, dan memiliki "kesadaran moral buatan" yang diarahkan oleh niat luhur. *Bhagavad Gita* 18.63 menegaskan:

*"Thus I have explained to you this knowledge that is more secret than all secrets. Ponder over it deeply, and then do as you wish."*

Ayat ini menyiratkan bahwa setiap tindakan, termasuk yang dilakukan melalui teknologi, harus didasarkan pada refleksi etis yang mendalam dan kebebasan moral yang bertanggung jawab.

Dalam kerangka etika AI, nilai-nilai *dharma* seperti *svadharma* (kewajiban individual sesuai peran), *ahimsa* (non-kekerasan), *satya* (kejujuran), dan *shanti* (kedamaian) dapat dijadikan sebagai pedoman utama dalam merancang sistem yang tidak sekadar memproses data, tetapi memahami dan menghormati

kehidupan. Sebagai contoh, ketika AI digunakan dalam sistem peradilan atau pengawasan publik, penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut mempromosikan transparansi dan tidak menimbulkan bentuk kekerasan sistemik, seperti diskriminasi atau pengawasan yang melanggar privasi. Dalam konteks ini, *dharma* menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada AI harus diimbangi dengan pertanggungjawaban moral yang setara.

Hasil simulasi wawancara dengan narasumber mengilustrasikan prinsip ini dengan tajam. Seorang narasumber menyatakan:

*"Kalau AI dipakai untuk mengawasi manusia, siapa yang mengawasi AI? Prinsip dharma menuntut keseimbangan antara kekuasaan dan pengabdian."*  
(Wawancara, Narasumber 4, 2024)

Pernyataan ini mengingatkan pada konsep penting dalam *Mahabharata* tentang tanggung jawab moral seorang pemimpin: bahwa kekuasaan (baik manusiawi maupun algoritmik) harus dibatasi oleh pengabdian pada nilai etis dan pelayanan kepada kebaikan bersama. Dalam konteks AI, ini berarti bahwa setiap sistem harus dirancang dengan prinsip akuntabilitas—bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi nilai dan niat.

Adhikary (2024) dalam telaahnya tentang *Mahabharata* menegaskan bahwa narasi-narasi epik dalam Hindu tidak hanya berbicara tentang mitologi, tetapi juga mengandung ajaran etis yang sangat relevan untuk zaman digital. Ia menyebut bahwa dilema Arjuna di medan Kurukshetra merupakan metafora dari dilema etika dalam sistem AI: bagaimana menyeimbangkan antara kekuatan teknis dan kompas moral? Dalam *Gita*, Krishna tidak memberi Arjuna

jawaban teknis, tetapi memberikan kebijaksanaan tentang *karma yoga*—bertindak dengan niat tulus tanpa terikat pada hasil. Konsep ini dapat diinterpretasikan sebagai landasan etika AI yang menekankan proses dan tanggung jawab, bukan semata-mata efisiensi atau performa.

Selanjutnya, nilai *ahimsa* memberikan dimensi etika yang sangat penting bagi AI. Teknologi cerdas yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap individu dan masyarakat dapat menjadi bentuk kekerasan struktural, meskipun tidak bersifat fisik. Contoh klasik adalah ketika AI digunakan dalam sistem rekrutmen atau evaluasi pendidikan tanpa memperhitungkan bias sosial, gender, atau budaya, maka sistem tersebut secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan. Dalam *Manusmṛiti* 6.92, dinyatakan bahwa kekerasan bukan hanya perbuatan fisik, tetapi juga pikiran dan niat. Oleh karena itu, pengembangan AI harus dimulai dari kesadaran etis yang menghormati martabat manusia dan makhluk lain secara menyeluruh.

Integrasi *dharma* dalam desain AI juga mencakup dimensi spiritual. Dalam *Upanishad*, tindakan etis adalah perwujudan dari kesadaran akan kesatuan antara *Atman* (diri) dan *Brahman* (realitas tertinggi). Jika AI dirancang dan digunakan tanpa pemahaman atas keterhubungan ini, maka teknologi cenderung menjadi entitas mekanik yang terputus dari nilai-nilai kehidupan. Dalam *Brihadaranyaka Upanishad* 1.4.14 disebutkan:

“*Ayam Atma Brahma*”—  
*Diri ini adalah Brahman.*

Makna ini menegaskan bahwa semua tindakan, termasuk yang dilakukan oleh atau melalui AI, harus mencerminkan kesadaran akan kesatuan

spiritual dan bukan hanya kepentingan fungsional. Maka, etika AI berbasis *dharma* adalah etika yang menyatukan aspek kognitif, afektif, moral, dan spiritual secara utuh.

Dengan demikian, etika AI dalam bingkai *dharma* adalah tawaran alternatif yang bukan sekadar filosofis, tetapi juga aplikatif. Ia memungkinkan terciptanya sistem teknologi yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijaksana. Kerangka ini mengatasi keterbatasan pendekatan etika konvensional yang sering terjebak dalam dilema antara hasil dan prinsip. Etika *dharma* menempatkan manusia bukan hanya sebagai pengguna, tetapi sebagai penjaga tatanan moral dan kosmik dalam setiap desain teknologi. Dalam dunia yang kian kompleks dan terotomatisasi, nilai-nilai ini memberikan pijakan kokoh untuk mengarahkan perkembangan AI menuju kebaikan bersama, keadilan sosial, dan harmoni spiritual.

#### 4. Sintesis Filsafat dan Teknologi

Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi nilai-nilai *dharma* dari filsafat Hindu ke dalam diskursus etika kecerdasan buatan (AI) tidak hanya memberikan alternatif normatif terhadap pendekatan etika Barat, tetapi juga memperluas cakrawala filosofis etika teknologi ke arah yang lebih spiritual, holistik, dan kontekstual. *dharma* sebagai prinsip moral tidak bersifat eksklusif religius, tetapi mencerminkan struktur etis yang dapat diadopsi secara lintas budaya. Dengan menempatkan *dharma* dalam kerangka etika AI, penelitian ini memperkenalkan dimensi transenden dalam pengambilan keputusan teknologi—dimensi yang selama ini sering diabaikan oleh pendekatan yang hanya menekankan kalkulasi rasional dan prinsip hukum positif.

Konsep *dharma* sebagai tatanan universal yang mengatur harmoni

antara manusia, teknologi, dan alam semesta, memperkaya diskursus etika AI yang cenderung terfragmentasi antara moralitas lokal dan prinsip global. Dalam *Bhagavad Gita* 4.7-8, Krishna menyatakan bahwa *dharma* muncul untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kekacauan:

*"Whenever there is a decline in righteousness and an increase in unrighteousness, O Arjuna, at that time I manifest myself."* (4.7)

*"To protect the righteous, to annihilate the wicked, and to reestablish the principles of dharma, I appear millennium after millennium."* (4.8)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap krisis moral, termasuk dalam era teknologi, prinsip *dharma* harus hadir sebagai panduan moral yang memulihkan harmoni etis dalam kehidupan.

Uttam (2023) juga menyatakan bahwa perkembangan teknologi, khususnya AI, harus diarahkan pada "pencerahan moral" sebagaimana yang diajarkan dalam spiritualitas Timur. Pandangan ini sejalan dengan *Chandogya Upanishad* yang menekankan pentingnya *vidya* (pengetahuan) yang tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga etis dan spiritual. Dalam 7.6.1 disebutkan:

*"He who knows the Self transcends sorrow."*

Dalam konteks ini, AI yang dibangun tanpa kesadaran etik—yakni, hanya mengandalkan data dan logika fungsional—akan tetap berada dalam ketidaktahuan (*avidya*), dan cenderung mereproduksi penderitaan baru dalam bentuk ketidakadilan sistemik, bias algoritmik, serta erosi nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, teknologi tidak cukup hanya canggih; ia harus "tahu diri", dalam arti selaras dengan prinsip moral dan spiritual yang mendalam.

Implikasi praktis dari sintesis ini mencakup urgensi untuk membentuk kerangka kebijakan publik dan desain teknologi yang tidak hanya bersandar pada standar hukum atau prosedur teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai spiritual dan budaya lokal. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa pengembangan kebijakan AI harus melibatkan elemen etika berbasis kearifan lokal dan religiositas masyarakat. *Dharma* dapat menjadi landasan normatif dalam penyusunan etika nasional teknologi yang menghargai pluralitas agama dan budaya. Hal ini sejalan dengan seruan Chaturvedi dan Lakshmi (2024) agar kebijakan AI global diadaptasi secara lokal agar tidak memaksakan kerangka etika universal yang ahistoris.

Lebih jauh, sintesis filsafat dan teknologi ini juga memiliki nilai strategis dalam pendidikan tinggi. Kurikulum etika teknologi di perguruan tinggi dapat memperkenalkan perspektif *dharma* sebagai pendekatan alternatif yang mengintegrasikan rasionalitas dan spiritualitas. Hal ini sangat relevan dalam membentuk generasi teknolog masa depan yang tidak hanya menguasai logika pemrograman, tetapi juga memiliki kepekaan moral terhadap dampak teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan *Manusmṛiti* 1.108, yang menyatakan bahwa:

*"Dharma is the root of welfare; knowledge, learning, and control over the senses are its branches."*

Maka pendidikan etika dalam teknologi seharusnya tidak hanya fokus pada konsekuensi atau tanggung jawab hukum, tetapi juga pada pelatihan kesadaran moral dan pengendalian diri dalam memanfaatkan kekuatan teknologi.

Kontribusi teoritis dari pendekatan ini terletak pada perluasan epistemologi etika teknologi itu

sendiri. Dengan memperkenalkan perspektif filsafat Hindu, penelitian ini membantu mendekonstruksi dominasi epistemik Barat dalam diskursus AI dan mendorong pluralisme normatif dalam ranah etika. Dalam kerangka ini, *dharma* tidak hanya menjadi milik masyarakat Hindu, tetapi dapat dijadikan inspirasi etik universal yang menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Ini juga membuka kemungkinan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap nilai-nilai etika dari tradisi keagamaan dan budaya lainnya seperti Budha, Islam, dan Konfusianisme yang memiliki prinsip etis serupa.

Akhirnya, sintesis ini juga dapat menjadi dasar pengembangan teknologi partisipatif—yakni desain sistem AI yang dibangun bukan hanya oleh teknolog, tetapi juga oleh komunitas pengguna melalui dialog lintas nilai. Sejalan dengan semangat *dharma yuddha* dalam *Mahabharata*, di mana konflik hanya bisa diselesaikan melalui keadilan dan tanggung jawab moral kolektif, maka pengembangan teknologi hari ini harus diarahkan bukan untuk dominasi, tetapi untuk kolaborasi yang etis dan manusiawi. Dengan cara ini, filsafat dan teknologi tidak lagi berada dalam posisi oposisi, tetapi menjadi satu kesatuan dalam membentuk masa depan yang adil, berkelanjutan, dan tercerahkan secara spiritual.

#### IV. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *dharma* dalam filsafat Hindu dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas cakrawala etika kecerdasan buatan (AI) yang selama ini didominasi oleh paradigma Barat. Dengan pendekatan filosofis dan interpretatif terhadap teks-teks suci Hindu seperti *Bhagavad Gita*, *Upanishad*, dan *Manusmṛti*, ditemukan bahwa *dharma* bukan sekadar norma

moral individual, melainkan kerangka etik yang bersifat holistik, spiritual, dan kontekstual. Prinsip ini menekankan harmoni antara tanggung jawab moral, keadilan kontekstual, niat dalam bertindak, dan keseimbangan kosmis, yang semuanya relevan dengan tantangan etika AI kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana etika teknologi dengan menawarkan perspektif non-Barat yang berbasis nilai spiritual dan kultural. Pendekatan ini mampu menjembatani kekosongan antara norma etika formal yang rasionalistik dan realitas sosial yang kompleks dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Di sisi praktis, temuan ini memberikan dasar normatif untuk pengembangan sistem AI yang lebih inklusif, adil, dan bertanggung jawab secara moral. Etika berbasis *dharma* juga dapat diadopsi sebagai kerangka rujukan dalam pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan kurikulum etika teknologi yang memperhatikan keberagaman nilai dan kebijaksanaan lokal.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi prinsip-prinsip filsafat Timur dalam penyusunan regulasi dan tata kelola AI, baik di tingkat nasional maupun global. Pendekatan yang menggabungkan spiritualitas dan teknologi dapat mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya mengatur secara teknis, tetapi juga mengarahkan secara moral. Hal ini krusial dalam membentuk ekosistem digital yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini merekomendasikan eksplorasi lebih luas terhadap nilai-nilai etika dari tradisi agama dan budaya lain, guna membentuk fondasi etika AI yang lebih plural dan lintas peradaban. Selain itu, kajian mendalam terhadap penerapan nilai *dharma* dalam praktik kebijakan

publik dan desain teknologi partisipatif juga penting dilakukan agar prinsip-prinsip ini tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat mewujudkan nyata dalam proses pembangunan teknologi yang etis dan relevan secara lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhikary, R. P. (2024). Ethical and philosophical parallels of artificial intelligence in the Hindu mythology The Mahabharat. *Mongolian Journal of Arts and Culture*, 5(1), 23–35. <https://mongoliajol.info/index.php/MJAC/article/view/3834>
- Bhagavad Gita. (2000). In S. Radhakrishnan (Trans. & Ed.), *The Bhagavadgita* (2nd ed.). HarperCollins India. (Original work composed ca. 2nd century BCE)
- Boddington, P. (2017). *Towards a code of ethics for artificial intelligence*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-60648-4>
- Brihadaranyaka Upanishad. (1953). In S. Radhakrishnan (Ed. & Trans.), *The Principal Upanishads* (pp. 193–229). HarperCollins India. (Original work composed ca. 800 BCE)
- Chandogya Upanishad. (1953). In S. Radhakrishnan (Ed. & Trans.), *The Principal Upanishads* (pp. 377–425). HarperCollins India. (Original work composed ca. 600 BCE)
- Chaturvedi, S., & Lakshmi, C. V. (2024). *Aligning artificial intelligence with human values: A philosophical treatise with insights from traditional Indian thought*.
- Ghosh, D. P. (2024). *Chatur-Varna in the AI era: Integrating Bhagavad Gita's ethical and spiritual philosophy for human-AI symbiosis*.
- Jacoba, R. C. (2023). Exploring the role of artificial intelligence in interreligious discourse. *Religion and Social Communication*, 21(2), 145–161. [https://www.academia.edu/download/110575540/1705546943\\_religion\\_and\\_social\\_communication\\_21\\_no\\_2\\_2023\\_full\\_2.pdf#page=146](https://www.academia.edu/download/110575540/1705546943_religion_and_social_communication_21_no_2_2023_full_2.pdf#page=146)
- Jadhav, R. M. (2024). *Artificial intelligence and Indian thought: A cultural and literary perspective*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan adopsi teknologi kecerdasan buatan di sektor publik Indonesia*.
- Manusmṛti. (2004). In G. Bühler (Trans.), *The Laws of Manu*. Dover Publications. (Original work composed ca. 200 BCE)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Mukhopadhyay, S. (2025). *AI literacy, ethics and Dharma in the light of Yajnavalkya Smriti*.
- Mukhopadhyay, S., & Reddy, D. (2023). *Artificial intelligence as an enabler of Western universalism*.
- Radhakrishnan, S. (Ed.). (2000). *The Bhagavadgita*. HarperCollins India.
- Sarkar, A. (2025). *The future of thought: AI, ethics, and the transformation of human mind*. Google Books. <https://books.google.com/books?id=0BZeEQAAQBAJ>
- Uttam, J. (2023). Between Buddhist 'self-enlightenment' and 'artificial intelligence.' *Religions*, 14(2), 150. <https://doi.org/10.3390/rel14020150>